

**KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA
DI BIDANG PERTANIAN
(KEP. MENDAGRI NO. 130-67 TAHUN 2000)**

NO	BIDANG KEWENANGAN	KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA
1	2	3
1.	Perencanaan dan Pengendalian.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan pembangunan pertanian. 2. Perencanaan operasional standar pelayanan minimal di bidang pertanian. 3. Perencanaan program dan proyek pembangunan pertanian. 4. Perencanaan kerjasama antar wilayah Kabupaten/Kota. 5. Pengendalian pelaksanaan pembangunan pertanian. 6. Evaluasi kinerja dan dampak pembangunan pertanian.
2.	Pengelolaan sumberdaya lahan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan tata ruang dan tata guna lahan. 2. Konservasi tanah dan air serta sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. 3. Rehabilitasi lahan kritis di kawasan pertanian. 4. Penetapan sasaran areal. 5. Pemetaan potensi dan Pengelolaan sumberdaya lahan. 6. Pencegahan alih fungsi lahan sawah beririgasi teknis dan setengah teknis.
3.	Pemanfaatan Air Irigasi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier. 2. Bimbingan pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi. 3. Pemantauan pemanfaatan sumber-sumber air dan air irigasi. 4. Bimbingan teknis pengelolaan sumber-sumber air dan air irigasi untuk budidaya tanaman. 5. Evaluasi pengelolaan air irigasi pertanian.

4.	Pengembangan Sumberdaya Manusia.	<ol style="list-style-type: none"> 6. Pembinaan dan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)/ Perkumpulan Petani Pemakai Air Tanah (P3AT). 7. Pembinaan teknis konservasi air. 8. Perencanaan pengembangan sumberdaya air. <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan ketenagakerjaan pertanian. 2. Pelaksanaan kegiatan pendidikan kedinasan di bidang pertanian. 3. Pelaksanaan diklat pegawai sesuai kebutuhan lokalita. 4. Pengumpulan data dan informasi SDM Pertanian. 5. Pengkajian SDM Pertanian dalam rangka evaluasi dampak kebijakan program pembangunan pertanian. 6. Pembinaan dan pengembangan diklat yang dikelola petani (Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya/P4S). 7. Pelaksanaan pemenuhan akreditasi SPP Daerah/Swasta.
5.	Penyuluhan Pertanian.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan dan program penyelenggaraan penyuluhan pertanian. 2. Penyusunan, perbanyakan dan penyebaran metoda penyuluhan pertanian dan materi penyuluhan baik dalam bentuk cetakan maupun alat elektronik sesuai dengan kebutuhan lokalita. 3. Penumbuhkembangan kelompok tani dan kelembagaan ekonomi petani. 4. Pembinaan dan pengembangan kerjasama kemitraan petani, penyuluh, peneliti dan LSM. 5. Pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh pertanian. 6. Pembinaan dan pengelolaan kelembagaan penyuluhan pertanian. 7. Pembinaan kepemimpinan petani, wanita tani, dan pemuda tani. 8. Pengelolaan perpustakaan pertanian. 9. Pengadaan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana penyuluhan pertanian.
6.	Penelitian, Pengembangan Teknologi Pertanian.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis teknis, ekonomis dan sosio budaya alat dan mesin pertanian. 2. Rekayasa prototipe dan modifikasi alat dan mesin pertanian untuk

7. **Pupuk dan Pestisida.**

- keperluan lokalita.
 3. Pembinaan, supervisi dan akselerasi, aplikasi teknologi dalam demonstrasi penetapan teknologi pertanian spesifik lokasi.
 4. Pemantauan dan pengawasan penerapan teknologi pertanian spesifik lokasi.
 5. Melaksanakan bimbingan dan pengawasan penerapan teknologi anjuran oleh petani.
 6. Melaksanakan pembinaan penerapan teknologi.
 7. Melaksanakan demonstrasi pengkajian penerapan teknologi anjuran kondisi spesifik lokalita.
 8. Melakukan kaji ulang alat dan mesin yang telah direkomendasikan secara periodik.
 9. Melakukan pengawasan teknologi dan pengujian hasil.
 10. Mempelajari temuan-temuan teknologi baru.
 11. Mencatat dan melaporkan perkembangan teknologi pertanian spesifik lokasi.
 12. Mengadakan kerjasama dengan sumber-sumber teknologi dalam rangka fisualisasi penerapan teknologi yang disuluhkan.
 13. Mengidentifikasi data potensi wilayah dan agroekosistem.
 14. Menginventarisasi hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh lembaga penelitian.
 15. Sosialisasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan HAKI.
 16. Sosialisasi inovasi teknologi dan bimbingan terapan teknologi di tingkat petani.
1. Pelaksanaan perencanaan kebutuhan pupuk.
 2. Pelaksanaan peringatan dini dan antisipasi terhadap kelangkaan pupuk dan pestisida.
 3. Pengembangan unit usaha pelayanan pupuk dan pestisida di tingkat desa.
 4. Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida
 5. Pemantauan dan evaluasi ketersediaan pupuk dan pestisida
 6. Bimbingan dan pembinaan pupuk dan pestisida.

8.	Obat Hewan.	<p>7. Pengawasan peredaran, penyimpanan, penggunaan serta pemusnahan pupuk dan pestisida.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan peredaran obat hewan di tingkat kios dan pengecer. 2. Pengawasan pemakaian sediaan biologis, farmasetik dan premix. 3. Bimbingan sediaan biologis, farmasetik dan premix. 4. Bimbingan dan pengawasan sediaan biologis, farmasetik dan premix.
9.	Alat dan Mesin Pertanian.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan pengadaan alat dan mesin pertanian untuk keperluan lokalita. 2. Rekomendasi penggunaan alat dan mesin pertanian untuk keperluan lokalita. 3. Pembinaan dan pengawasan mutu alat dan mesin pertanian untuk keperluan lokalita. 4. Pembinaan dan pengembangan pelayanan jasa alat dan mesin pertanian. 5. Perizinan pengadaan dan peredaran alat dan mesin pertanian produk lokal dan atau impor. 6. Bimbingan cara pengoperasian dan pemeliharaan alat dan mesin pertanian. 7. Pembinaan dan bimbingan bengkel/pengrajin alat dan mesin pertanian.
10.	Pakan Ternak.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan produksi dan penggunaan pakan dan bahan baku konsentrat. 2. Pengawasan mutu pakan konsentrat dan bahan baku dalam pemakaian. 3. Bimbingan produksi hygiene pakan ternak. 4. Pengawasan mutu pakan dan bahan baku pakan dalam peredaran. 5. Bimbingan produksi benih hijauan pakan ternak.
11.	Perbenihan Tanaman.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan dan pengelolaan Balai Benih milik Pemerintah. 2. Pembinaan dan Pengawasan Balai Benih milik swasta. 3. Pembinaan dan Pengawasan penangkar benih. 4. Pembinaan dan pengawasan perbanyak peredaran dan penggunaan benih sebar.

12.

Perbibitan Ternak.

5. Bimbingan dan pemantauan produksi benih.
6. Bimbingan penerapan standar-standar teknis perbenihan yang meliputi sarana, tenaga dan metode.
7. Pembinaan dan pengembangan sistem informasi perbenihan.
8. Pemantauan dan evaluasi mutu benih yang beredar.
9. Pemberian izin produksi benih.
10. Pengujian dan penyebarluasan benih/bibit varietas unggul lokal tanaman pangan dan hortikultura.
11. Pengaturan penggunaan benih/bibit unggul.
12. Memperbanyak dan menyalurkan mata tempel dan perbanyakn bibit hortikultura.
13. Pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk. Sertifikasi benih.
14. Penetapan sentra-sentra produksi.
15. Identifikasi Benih/Bibit varietas unggul lokal tanaman pangan dan hortikultura.

1. Bimbingan penerapan standar-standar teknis dan sertifikasi perbibitan meliputi sarana, tenaga kerja, mutu dan metode.
2. Pengawasan peredaran mutu bibit.
3. Pengujian populasi dasar ternak, seleksi dan registrasi ternak bibit.
4. Pemantauan dan inventarisasi potensi wilayah sumber ternak bibit.
5. Pemantauan dan pengawasan penyaluran ternak bibit yang dilakukan swasta.
6. Pemantauan pelaksanaan dan registrasi hasil inseminasi buatan.
7. Bimbingan kastrasi ternak non bibit.
8. Pemberian izin produksi bibit.
9. Bimbingan produksi bibit.
10. Bimbingan pembuatan dan pengesahan silsilah ternak.
11. Bimbingan dan pelaksanaan pengadaan dan atau produksi mudigah, alih mudigah serta pemantauan pelaksanaan dan registrasi hasil mudigah.
12. Bimbingan pelaksanaan inseminasi buatan yang dilakukan oleh swasta.
13. Produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik) untuk Kabupaten.
14. Pengadaan mani beku ternak produksi dalam negeri.

13	Perlindungan Tanaman.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pemberantasan dan analisis dampak kerugian Organisme Pengganggu Tumbuhan. 2. Bimbingan pengamatan, pemantauan, peramalan OPT kepada masyarakat. 3. Pengumpulan dan pengolahan data OPT agroklimat. 4. Bimbingan jasa perlindungan tanaman. 5. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT dan rekomendasi pengendaliannya. 6. Pengamatan dan pemantauan daerah yang dicurigai sebagai sumber infeksi OPT. 7. Menetapkan larangan pemasukan dan pengeluaran media pembawa hama dan penyakit tanaman. 8. Bimbingan pemanfaatan dan pemantauan penggunaan agens hayati 9. Bimbingan, pengelolaan dan konservasi agens hayati. 10. Pengawasan penggunaan pestisida. 11. Penetapan areal puso dan atau eksplosi karena serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan bencana banjir serta kekeringan. 12. Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman. 13. Pengendalian eksplosi hama dan penyakit. 14. Pelaksanaan penyidikan penyakit di bidang pertanian. 15. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular di bidang pertanian. 16. Bimbingan dan pemantauan pelaksanaan pemberantasan hama dan penyakit tanaman. 17. Pengelolaan laboratorium hama dan penyakit.
14.	Kesehatan Hewan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan urusan kesejahteraan hewan. 2. Pembangunan dan pengelolaan laboratorium kesehatan hewan Tipe C 3. Pembangunan dan pengelolaan pasar hewan dan unit-unit pelayanan kesehatan hewan. 4. Bimbingan, pemantauan dan pengawasan pembangunan dan operasional pasar hewan dan unit-unit pelayanan kesehatan hewan. 5. Pengamatan dan pencatatan kejadian penyakit hewan lingkup Kabupaten.

		<ol style="list-style-type: none"> 6. Penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasiti, bakteriawi, virus dan penyakit hewan lainnya. 7. Pemetaan penyakit hewan. 8. Pemantauan dan pengawasan penerapan standar-standar teknis Pasar Hewan dan unit-unit pelayanan kesehatan hewan. 9. Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.
15.	Penyebaran dan Pengembangan Peternakan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan & pengawasan penyebaran dan pengembangan serta redistribusi ternak. 2. Bimbingan dan pengawasan pengembangan ternak. 3. Penyebaran dan pengembangan serta redistribusi ternak pemerintah.
16.	Pemberian Perizinan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian izin usaha obat hewan di tingkat depo, toko, kios dan pengecer. 2. Pemberian izin produksi bibit. 3. Pemberian izin usaha peternakan. 4. Pemberian izin laboratorium kesehatan hewan. 5. Pemberian izin usaha Rumah Sakit/Klinik Hewan. 6. Pemberian izin usaha RPH/RPU kecuali untuk ekspor-impor.
17.	Pembinaan Usaha.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan penerapan standar-standar teknis pembinaan mutu dan pengolahan hasil pertanian. 2. Pemantauan dan pengawasan lembaga sistem mutu produk pertanian. 3. Bimbingan peningkatan mutu hasil pertanian. 4. Bimbingan pengelolaan unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan hasil pertanian. 5. Pelaksanaan promosi komoditas pertanian. 6. Pengumpulan, pengolahan, pelayanan dan penyebarluasan informasi pertanian. 7. Bimbingan analisis usaha tani dan pemasaran hasil pertanian. 8. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani. 9. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan

		hasil pertanian.
		10. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha pertanian.
		11. Pelaksanaan study Andal/UKL-UPL di bidang pertanian.
		12. Bimbingan pelaksanaan AMDAL.
		13. Pemberian izin usaha agroindustri.
		14. Pemantauan dan pengawasan izin usaha agroindustri pertanian.
18.	Sarana Usaha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan teknis pembangunan dan pengembangan jalan usaha tani. 2. Bimbingan teknis pembangunan dan pengembangan pembukaan lahan. 3. Bimbingan teknis pembangunan dan pengembangan jaringan irigasi tingkat usaha tani. 4. Bimbingan teknis pembangunan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil pertanian.
19.	Pembiayaan Agribisnis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbingan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan agribisnis. 2. Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis. 3. Bimbingan pemanfaatan kredit agribisnis. 4. Pembinaan dan bimbingan terhadap lembaga keuangan mikro pedesaan . 5. Pemantauan dan evaluasi penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian kredit. 6. Pembinaan dan bimbingan terhadap lembaga keuangan mikro pedesaan.
20.	Ketahanan Pangan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan produksi dan ketersediaan/cadangan pangan strategies nabati dan hewani. 2. Pemantauan, Pengkajian, dan pengembangan cadangan pangan pemerintah. 3. Koordinasi lintas wilayah dalam rangka kecukupan pangan dan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat. 4. Fasilitasi pelaksanaan, norma dan standar pengembangan distribusi pangan. 5. Pemantauan, Pengkajian, dan pengawasan penerapan standar teknis

- distribusi pangan.
6. Pemantauan dan pengawasan distribusi pangan di wilayah Kabupaten/Kota.
 7. Pengaturan, pembinaan dan pengawasan sistem pangan.
 8. Kebijakan pelaksanaan kewaspadaan pangan.
 9. Pelaksanaan pengawasan mutu dan keamanan pangan.
 10. Pemantauan dan pemanfaatan hasil pangan produk rekayasa genetik.
 11. Pengelolaan sistem jaminan mutu.
 12. Pembinaan perbaikan mutu pangan masyarakat.
 13. Koordinasi penanggulangan kerawanan pangan masyarakat di pedesaan dan perkotaan.
 14. Perumusan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan gejala kekurangan pangan serta keadaan darurat pangan.
 15. Pengembangan peran serta koperasi dan swasta dalam menanggulangi kerawanan pangan.
 16. Pengembangan sumberdaya manusia di bidang kewaspadaan dan pengembangan mutu pangan siap konsumsi.
 17. Pengkajian, perekayasa dan pengembangan kelembagaan ketahanan pangan di pedesaan.
 18. Penggalangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan cadangan pangan.
 19. Peningkatan motivasi masyarakat/aparat dalam rangka pemantapan ketahanan pangan.
 20. Pelaksanaan promosi pengembangan bahan pangan lokal dan makanan tradisional.
 21. Gerakan/sosialisasi pengembangan lumbung pangan masyarakat dan stabilisasi harga pangan masyarakat.
 22. Pemberdayaan kelembagaan petani dalam rangka ketahanan pangan masyarakat.
 23. Penyuluhan dan penerangan kepada masyarakat tentang ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga.
 24. Pengembangan kemitraan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan masyarakat.

21.	<p>Pengembangan Statistik dan Sistem Informasi Pertanian.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 25. Peningkatan akses masyarakat terhadap lembaga permodalan, pemasaran hasil, dan teknologi dalam rangka gerakan ketahanan pangan masyarakat. 26. Pemantauan pola konsumsi masyarakat. 27. Gerakan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber pangan wilayah. 28. Fasilitasi penyuluhan dan pelatihan penganeekaragaman konsumsi pangan wilayah. <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan data dan statistik spesifik lokasi serta sistem informasi pertanian spesifik lokasi. 2. Penyimpulan, pengolahan dan analisis data primer komoditas pertanian dan sumberdaya alam. 3. Peramalan dan perhitungan produksi hasil pertanian. 4. Diseminasi kepada pemakai langsung. 5. Pembinaan dan pengelolaan lembaga perstatistikan dan informasi pertanian. 6. Pengadaan SDM perstatistikan dan sistem informasi pertanian. 7. Pengadaan sarana dan prasarana perstatistikan dan informasi pertanian. 8. Perawatan dan evaluasi sistem dan teknologi sistem informasi.
-----	--	--